

Judul : Konsorsium PNRI Akui Adanya Lobi DPR
Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

:: KASUS DUGAAN KORUPSI E-KTP

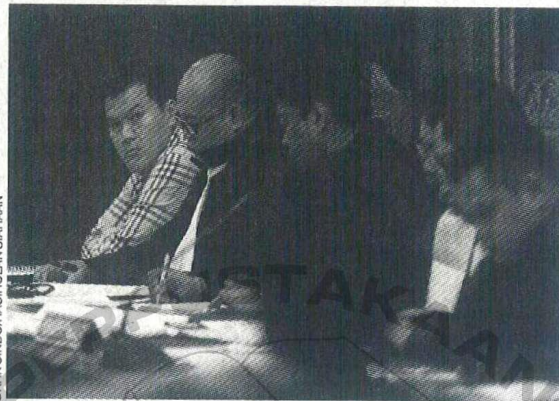
Konsorsium PNRI Akui Adanya Lobi DPR

JAKARTA - Pemenang tender proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI) mengaku telah menerbitkan dokumen analisa risiko dengan salah satunya berisi upaya melobi DPR untuk meloloskan anggaran e-KTP.

Fakta tersebut terungkap dari kesaksian Direktur Utama Perum PNRI 2009-2013 sekaligus ketua manajemen bersama konsorsium Perum PNRI Isnu Edhi Wijaya dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Isnu Edhi Wijaya bersaksi dalam persidangan terdakwa Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dengan perkara dugaan korupsi pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2012 (hingga pembayaran adendum kesembilan 2013).

Isnu membenarkan, setelah dimenangkan oleh konsorsium Perum PNRI, kemudian ada adendum kontrak



Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Andi Agustinus alias Andi Narogong (kiri) mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

hingga sembilan kali, termasuk di dalamnya untuk pembayaran terakhir dari Kemendagri ke konsorsium.

Anggota JPU Abdul Basir lantas mengonfirmasi kepada Isnu tentang catatan tangan yang dibuatnya serta analisis risiko yang dibuat konsorsium. Khususnya tentang analisa risiko tentang anggaran proyek e-KTP yang berpotensi mandek pembahasan dan pengesahannya di DPR setelah 2011 menuju 2012.

JPU Basir menggariskan, KPK sudah menyita barang bukti dokumen tertanggal 5 Oktober 2011 dari kantor Pe-

rum PNRI saat penggeledahan. Dokumen itu ditandatangani oleh Isnu selaku direktur utama Perum PNRI.

Dokumen tersebut, ungkap Basir, sudah di-scan JPU. Dalam dokumen, Isnu mencantumkan ada 10 risiko dalam proyek pengadaan e-KTP. Salah satunya risiko politik yang masuk kategori pemerintah. Untuk mengatasi risiko politik terkait pembahasan dan persetujuan anggaran, maka perlu melakukan lobi ke DPR.

"Risikonya anggaran tidak akan disetujui disebabkan oleh partai di DPR. Akibatnya tidak

ada perpanjangan proyek. Yang harus dibangun oleh konsorsium, membangun hubungan komunikasi yang proaktif dengan anggota DPR untuk memastikan proyek dan mendapatkan informasi jika anggaran proyek tidak disetujui. Saudara yang tanda tangan," kata JPU Basir kepada Isnu.

Isnu membenarkan 10 analisis risiko tersebut dan jalan keluar atas risiko-risiko itu, termasuk tentang komunikasi proaktif atau melobi DPR. "Yang buat (analisa risiko dan jalan keluarnya) adalah konsultan dari Sucofindo. Hasil *risk* (risiko) ini pernah dipresentasikan keseluruhan anggota konsorsium di kantor Perum PNRI. Dia (Sucofindo) membuat sesuai kemampuannya, barangkali sampai ke politik dan sebagainya. Dari hasil *risk* inilah kemudian saya laporkan ke depan pengawas kami," papar Isnu.

Hanya Isnu mengaku tidak mengetahui bagaimana kelanjutan lobi ke DPR untuk pengesahan anggaran proyek e-KTP. Pasalnya, Isnu secara pribadi tidak pernah melakukan komunikasi dengan DPR maupun anggota DPR.

● **sabir laluhu**